BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu proses penegakan hukum adalah terdapat pada institusi pengadilan. Institusi pengadilan berperan untuk mengadili, dan kemudian memutuskan tentang bersalah atau tidaknya seseorang yang disertai dengan penetapan pertanggung jawaban pidananya. Di sini diperlukan keahlian, integritas, dimana kecermatan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif.¹

Di Indonesia, pengadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui aktivitas hakim yang memiliki peranan penting dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan pengadilan merupakan tolok ukur bagi cerminan keadilan. Hakim dalam memutus perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 dan Pasal 25

¹Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 3 diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>, pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 14.21 WIB.

mengatur bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah”. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun dalam kebebasan tersebut hakim tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang ditanganinya karena hakim terikat oleh aturan hukum yang berlaku.

Hakim dalam hal ini juga harus dapat memberi putusan yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam putusannya hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Putusan hakim sangat berpengaruh atas suatu perkara karena keadilan menjadi hal yang sangat diharapkan. Putusan hakim tersebut mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan hakim inilah yang akhir-akhir ini mendapat sorotan dari masyarakat, misalnya terkait dengan putusan bebas mengenai perkara tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta

kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP mengatur bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Artinya, semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²

Pasal 1 butir 11 KUHAP mengatur bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut carayang diatur dalam undang-undang ini”.

²Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.131.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, terdapat 3 jenis putusan hakim, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas. Sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan menurut hukum. Pada penulisan ini penulis akan menitikberatkan pada putusan bebas oleh hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun untuk memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan Eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), Legislatif dan Yudikatif.

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Menurut Romli Atmasasmita dalam Vani Kurnia, menjelaskan bahwa: “digolongkannya korupsi di Indonesia sebagai *extra ordinary crime* adalah karena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*)”.³

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dibuktikan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

³Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 1 Nomor 3, 2020, hlm. 4 diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>, pada tanggal 6 Juni 2021, Pukul 21.39 WIB.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dibentuknya sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya.⁴

Adapun contoh kasus putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim pada pelaku tindak pidana korupsi yaitu melalui putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb. Sebelumnya, terdakwa sudah melakukan praperadilan. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April 2015 lalu telah mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan perluasan objek praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP.⁵ Definisi praperadilan berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah bahwa:

⁴Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 194.

⁵Ilham Firdaus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, "Praperadilan Penetapan Status Tersangka Korupsi Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal

Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁶

Pengajuan permohonan gugatan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh Pasal 1 butir 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Walaupun terdapat pembatasan secara limitatif terhadap permohonan gugatan praperadilan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan status tersangka terhadap seseorang merupakan bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk perampasan terhadap hak asasi seseorang. Mahkamah Konstitusi berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang samadi hadapan hukum.⁷

Pada putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Spn dengan tersangka atas nama Asril, Saiful Efrizal dan Wardodi Aria Putra, Hakim

Analogi Hukum, Vol. 2 Nomor 3, 2020, hlm. 366 diakses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 00.22 WIB.

⁶Claudia Permata Dinda, Usman, Imam Tri Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 1 Nomor 2, 2020, hlm. 4 diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>, pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 22.24 WIB.

⁷Lulu Hanifah, 2015, *MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan*. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796>, diakses pada 6 Juni 2021, Pukul 20.58 WIB.

mengadili menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya dan menyatakan penetapan permohonan pemohon praperadilan sebagai tersangka. Adapun kasus bermula dari ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan jalan pungut mudik sungai kuning kecamatan air hangat timur kabupaten kerinci pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017.

Setelah praperadilan ketiga tersangka ditolak oleh majelis hakim, proses pemeriksaan di pengadilan dilanjutkan. Pada akhirnya melalui putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmbada 3 (tiga) tersangka dinyatakan bebas oleh Hakim. Kedua putusan tersebut berasal dari perkara yang sama dan para pihak yang sama, hanya kemudian pemeriksaannya perkara tersebut dipisah menjadi beberapa berkas (*splitsing*). Pada putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb, ketiga terdakwa dinyatakan oleh hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum yakni dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

dan subsidair Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **Analisis Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nomor Putusan 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu “Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku

tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan putusan bebas oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, dapat pula dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum positif di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan tawaran bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memutus dan menyelesaikan perkara putusan bebas oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi, selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul skripsi ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah: “Penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.⁸

2. Putusan Bebas

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁹

Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

⁸Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, *Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat*, AMP-YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm. 52.

⁹Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

3. Pelaku Tindak Pidana

Definisi pelaku menurut KUHP Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana (*dader*) adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Tindak Pidana Korupsi

Definisi tindak pidana korupsi dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Menurut Andi Hamzah, pengertian Tindak Pidana Korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu: “Kebusukan, keburukan,

kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”.¹⁰

Secara yuridis pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun unsur yang harus dikaji berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yaitu: Pertama, memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua, memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga, memperkaya korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Berdasarkan pemaparan konsep pengertian di atas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

¹⁰Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4-5.

E. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Adapun teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Teori Putusan Hakim

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP mengatur bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Artinya, semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP, terdapat 3 jenis putusan hakim, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas.

¹¹Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 131.

a. Putusan Bebas

Secara teoretis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.¹²

¹²Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsver volging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu perbuatan terdakwa terbukti, dan bukan merupakan perbuatan pidana.¹³

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.¹⁴

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau *veroordelling* dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa

¹³Tolib Effendi, *Loc. Cit.*

¹⁴Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 188.

melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.¹⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.

Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- 1) Menerima atau menolak putusan;
- 2) Mempelajari putusan;
- 3) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi;
- 4) Mengajukan banding;
- 5) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.¹⁶

2. Teori pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak

¹⁵Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 186.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 18.

boleh sesukan hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁷

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperhatikan suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹⁸

Dikaji dari prespektif yuridis, M. Yahya Harahab mengungkapkan bahwa:

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁹

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang

¹⁷Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Jurnal Yuridika*, Volume 32 Nomor 1, Januari 2017, diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/4780/3515> pada tanggal 6 Juni 2021, Pukul 22.10 WIB.

¹⁸Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47.

¹⁹M. Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 252.

akan disampaikan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.²⁰

Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

- a. *Conviction in time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macammacam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.
- b. *Conviction in raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction in time memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan itu muncul, sistem pembuktian conviction in raisonee memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan

²⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 99.

menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi hukuman, sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah hanya sebuah mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction in raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²¹

Sangat jelas kiranya, bahwa sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana

²¹M. Yahya Harahab, *Op.Cit.*, hlm. 279-280.

selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHP juga ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum”.²² Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa ketentuan-ketentuan pengaturan sanksi pidana antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya”.²³ Pada pendekatan ini, penulis menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

90. ²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 136.

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Spn, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

“Dalam pendekatan konseptual, peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pandangan-pandangan serta pendapat para sarjana hukum dalam konsep-konsep serta pengertian dari korupsi, serta yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan meneliti kasus Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Spn, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁴*Ibid.*, hlm 177.

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Spn, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai peraturan pelaksanaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku literatur ilmu hukum, Jurnal ilmu hukum, hasil seminar dan workshop yang mempunyai kaitan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk berupa kamus hukum, ensiklopedia dan website yang relevan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang

diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik Sistem Kartu (*Card System*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan system kartu hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa dan menyimpulkan konsep yang ada.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul diolah dengan cara sistematisasi bahan-bahan hukum tersebut, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum berupa interpretasi gramatikal, sistematis dan interpretasi lainnya yang sesuai dengan masalah yang ditemukan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini secara lebih mendalam, maka materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini dikelompokkan dalam 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penyampaiannya adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Konsep Pemikiran Tentang Putusan Bebas, Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim dan Pembuktian.
- BAB III** Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaturan Praperadilan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta analisis putusan bebas pada pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.
- BAB IV** Pada bab ini merupakan bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab III. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.